

**BELAJAR DARI SINGAPURA: NEGARA YANG SUKSES
MEMBERANTAS KORUPSI**

Indah Aurelly /
indahaureliindah94@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik korupsi bukan hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, mencari model negara yang berhasil menekan korupsi menjadi sangat penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks global, Singapura sering dipuji sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 yang dirilis oleh Transparency International, Singapura menempati posisi tiga besar negara paling tidak korup di dunia. Capaian ini bukan kebetulan, melainkan hasil konsistensi kebijakan antikorupsi yang kuat dan sistemik.

Mempelajari strategi pemberantasan korupsi Singapura menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan yang efektif, mulai dari penegakan hukum, reformasi birokrasi, hingga peningkatan kesejahteraan aparatur. Dengan memahami faktor-faktor keberhasilan tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di dalam negeri.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Saya berpendapat bahwa keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi merupakan hasil dari kombinasi penegakan hukum yang tegas, lembaga antikorupsi yang independen, kesejahteraan pegawai negeri yang tinggi, serta birokrasi yang transparan dan terdigitalisasi. Model multidimensional ini sangat relevan diterapkan di Indonesia untuk memperkuat tata kelola publik dan meningkatkan integritas pemerintahan.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1. Argumen Pertama: Penegakan hukum yang kuat melalui lembaga independen

Singapura memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang disebut **Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)**. CPIB beroperasi secara independen dan dapat menyelidiki siapa pun tanpa pengecualian, termasuk pejabat tinggi negara. Transparansi (International (2023), n.d.), melalui laporan CPI 2023, menegaskan bahwa independensi lembaga hukum merupakan elemen kunci rendahnya tingkat korupsi di Singapura. Mekanisme hukum yang tegas dan tidak pandang bulu menciptakan efek jera dan budaya takut terhadap korupsi di kalangan pejabat maupun pegawai publik.

3.2. Argumen Kedua: Kesejahteraan aparatur negara yang kompetitif

Salah satu strategi penting Singapura dalam mencegah korupsi adalah peningkatan gaji pegawai negeri agar setara dengan sektor swasta. Menurut (Quah & Consultant, n.d.), kebijakan remunerasi tinggi terbukti mengurangi insentif untuk melakukan korupsi serta menarik sumber daya manusia berkualitas ke sektor publik. Dengan tingginya kesejahteraan, pegawai publik lebih termotivasi untuk menjaga integritas pekerjaan dan menghindari risiko kehilangan posisi yang bernilai tinggi.

3.3. Argumen Ketiga: Digitalisasi birokrasi untuk meminimalkan peluang korupsi

Singapura merupakan salah satu negara dengan penerapan e-government paling maju di dunia. Digitalisasi layanan publik mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan birokrat, sehingga peluang praktik suap menjadi semakin kecil. (World Bank (2020), n.d.) mencatat bahwa sistem digital governance di Singapura secara signifikan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi. Transformasi digital ini menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan Singapura menekan peluang korupsi di level pelayanan publik.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Pengalaman Singapura memberikan sejumlah implikasi penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Pertama, inJdependensi lembaga antikorupsi harus dijaga agar dapat menjalankan tugas tanpa tekanan politik (Rozikin et al., 2025; Laode M. Syarief dalam Republika, n.d.). Kedua, reformasi remunerasi aparatur negara perlu dipertimbangkan untuk mengurangi faktor ekonomi penyebab korupsi. Ketiga, digitalisasi layanan publik wajib dipercepat agar birokrasi menjadi lebih transparan dan minim interaksi yang berpotensi koruptif (Tim Peneliti Garuda, 2024; Maulana, 2025; World Bank, n.d.).

Selain itu, pendekatan multidimensi Singapura menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan memperkuat hukum, tetapi juga harus memperbaiki budaya dan sistem kerja dalam pemerintahan (Rozikin et al., 2025; Laode M. Syarief dalam *Republika*, n.d.). Dengan mengadopsi strategi yang relevan dari Singapura, Indonesia berpeluang menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih serta memperbaiki persepsi global terhadap tingkat korupsi nasional.

5. PENUTUP

Berdasarkan berbagai bukti ilmiah dan praktik kebijakan, Singapura telah membuktikan bahwa korupsi dapat ditekan melalui kombinasi kebijakan struktural dan budaya integritas. Penegasan ulang opini saya adalah bahwa kesuksesan Singapura terletak pada penegakan hukum yang tegas, kesejahteraan aparatur yang tinggi, serta reformasi birokrasi berbasis teknologi.

Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu memperkuat independensi lembaga antikorupsi, meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi melalui digitalisasi, serta melakukan reformasi remunerasi pegawai negeri. Dengan komitmen politik dan implementasi konsisten, langkah-langkah ini dapat membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas tinggi.

REFERENSI

International (2023). (n.d.). *CORRUPTION PERCEPTIONS*.

Quah, J. S. T., & Consultant, A. (n.d.). *Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific Countries : An Evaluation of their Performance and Challenges*.

Rozikin et al., 2025; Laode M. Syarief dalam *Republika*, 2024. (n.d.). *UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE _ PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA _ Rozikin _ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*.

Tim Peneliti Garuda, 2024; Maulana, 2025; World Bank, 2025. (n.d.). *Garuda - Garba Rujukan Digital*.

World Bank (2020). (n.d.). *Singapore _ World Bank Group*.